

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, dan transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara sebagian (parsial) maupun secara bersama-sama (simultan). Responden dalam penelitian ini berjumlah 330 orang wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bojonagara Bandung. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji regresi bahwa pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa secara parsial variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Berdasarkan hasil uji regresi bahwa pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa secara parsial variabel pemahaman perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Berdasarkan hasil uji regresi bahwa pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa secara parsial variabel transparansi dalam pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Berdasarkan hasil uji regresi bahwa pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa secara simultan variabel pengetahuan perpajakan,

pemahaman perpajakan, dan transparansi dalam pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan pengetahuan wajib pajak akan perpajakan, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu memberikan pengetahuan dengan cara salah satunya mengupdate peraturan perpajakan yang terbaru, sehingga wajib pajak tidak akan kesulitan dalam menjalankan kewajibannya. Dengan begitu masyarakat akan terdorong untuk membayar pajak secara sukarela sehingga kepatuhan akan pajak pun dapat semakin baik lagi.
2. Untuk lebih meningkatkan pemahaman wajib pajak akan perpajakan, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mensosialisasikan peraturan pajak yang terbaru terlebih jika itu merupakan hal yang harus ditaati (bersifat memaksa) oleh wajib pajak, atau dengan memberikan penyuluhan mengenai suatu program baru yang dapat mendukung dan mempermudah sistem pembayaran maupun pelaporan pajak.
3. Agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau wajib pajak, pemerintah sebaiknya menjalankan pemerintahan yang bersih, jujur, adil

dan terbuka (transparan) sehingga masyarakat tidak lagi mengeluh maupun terbebani bila mendengar kata pajak atau membayar pajak.

4. Bagi wajib pajak, mari kita belajar lebih mengenal perpajakan, tidak cukup hanya sekedar tahu tetapi penting juga untuk paham mengenai perpajakan untuk menghindari adanya kesalahan yang akan merugikan wajib pajak secara nominal maupun waktu yang akan ditanggung jika terjadi pelanggaran saat menjalani ketentuan peraturan perpajakan.

